

PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP ANGKA PUTUS SEKOLAH PADA JENJANG SD, SMP, DAN SMA DI KOTA BANJARBARU

Ayu Nadila¹, Suratno², Monry Fraick Nicky Gillian Ratumbuysang³, Melly Agustina Permatasari⁴

¹Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, 2110113120005@mhs.ulm.ac.id

² Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, ontar_ria@ulm.ac.id

³ Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, monryfng@ulm.ac.id

⁴ Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, mellyap@ulm.ac.id

DOI

<https://doi.org/10.26740/jupe.v13n3.p234-247>

Article history

Received

2 June 2025

Revised

18 August 2025

Accepted

2 September 2025

How to cite

Nadila, A., Suratno, S., Ratumbuysang, M. F. N. G., Permatasari, M. A. (2025). Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap angka putus sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA di Kota Banjarbaru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 13(3), 234-247.

<https://doi.org/10.26740/jupe.v13n3.p234-247>

Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Angka Putus Sekolah

Keywords: Poverty Level, School Dropout Rate

Corresponding author

Ayu Nadila

2110113120005@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap angka putus sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA di Kota Banjarbaru. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif komparatif dan analisis kebijakan, serta pengolahan data menggunakan software Microsoft Excel. Data time series dari tahun ajaran 2015/2016 hingga 2024/2025 diperoleh dari sumber sekunder seperti laporan resmi Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial, dan instansi pendidikan terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sehingga tidak diperlukan teknik sampling atau kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah. Kecamatan Cempaka, dengan 3.471 jiwa fakir miskin, mencatat angka putus sekolah tertinggi. Kecamatan Landasan Ulin, dengan 2.388 jiwa fakir miskin, memiliki angka putus sekolah kategori sedang. Sebaliknya, Kecamatan Banjarbaru Utara, dengan 1.087 jiwa fakir miskin, menunjukkan angka putus sekolah yang sangat rendah. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar risiko anak-anak mengalami putus sekolah, terutama di jenjang pendidikan menengah atas.

Abstract

This study aims to analyze the influence of poverty levels on dropout rates at elementary, junior high, and senior high schools in Banjarbaru City. The method used is quantitative research with comparative descriptive analysis and policy analysis, and data processing using Microsoft Excel software. Time series data from the 2015/2016 to 2024/2025 academic years were obtained from secondary sources such as official reports from the Central Statistics Agency, the Social Services Agency, and related educational institutions. Data collection was conducted through literature studies, so no sampling techniques or questionnaires were required. The results of the study indicate a significant influence between poverty levels and dropout rates. Cempaka District, with 3,471 poor people, recorded the highest dropout rate. Landasan Ulin District, with 2,388 poor people, had a moderate dropout rate. Conversely, North Banjarbaru District, with 1,087 poor people, showed a very low dropout rate. These findings confirm that the higher the poverty level, the greater the risk of children dropping out of school, especially at the senior high school level.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



PENDAHULUAN

Pentingnya mengkaji angka putus sekolah tidak dapat dipandang sebelah mata. Fenomena ini cenderung membuat angka putus sekolah semakin meningkat seiring dengan tingginya tingkat pendidikan. Kondisi ini kemudian menimbulkan dampak dari putus sekolah, yaitu meningkatkan jumlah pengangguran, menyebabkan kerugian di masa depan bagi anak, orangtua, dan masyarakat, serta menjadi beban orangtua. Akar permasalahan ini disebabkan oleh faktor ekonomi menjadi faktor utama alasan anak putus sekolah. Ketidakmampuan ekonomi keluarga yang relatif rendah membuat orang tua kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, termasuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya (Padli, 2023).

Data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) menunjukkan bahwa tahun ajaran 2023/2024, jenjang SD mencatat angka putus sekolah tertinggi dengan 24 anak putus sekolah, sedangkan SMP dan SMA mengalami penurunan masing-masing menjadi 1 anak putus sekolah. Namun, puncak tertinggi data anak putus sekolah pada 10 tahun terakhir dari tahun ajaran 2015/2016 sampai tahun ajaran 2024/2025 di Kota Banjarbaru terjadi pada jenjang SMA tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 40 anak putus sekolah. Untuk tahun ajaran terkini 2024/2025 data angka putus sekolah di Kota Banjarbaru tidak tercatat dalam sistem NPD (Neraca Pendidikan Daerah). Pola ini menunjukkan bahwa meskipun perhatian terhadap pendidikan di jenjang menengah telah membuahkan hasil berupa penurunan angka putus sekolah, namun jenjang dasar masih menghadapi tantangan serius yang perlu ditangani secara lebih intensif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang persentase penduduk miskin di Kota Banjarbaru dari kurun waktu 2015 hingga 2024. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 4,9%, kemudian mengalami sedikit penurunan dan kenaikan yang tidak signifikan hingga tahun 2017. Setelah itu, tren penurunan mulai terlihat lebih konsisten, terutama dari tahun 2018 yang berada di angka 4,19%, turun hingga mencapai angka 3,79% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat Kota Banjarbaru secara bertahap dalam satu dekade terakhir. Namun, meskipun tren menurun, keberadaan kemiskinan tetap menjadi isu penting yang perlu ditangani secara berkelanjutan, mengingat dampaknya terhadap berbagai aspek sosial seperti pendidikan, termasuk angka putus sekolah.

Penelitian ini mengacu pada teori kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953) dalam penelitian Rahman & Alamsyah (2019) bahwa kemiskinan digambarkan sebagai konsekuensi dari lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang berlangsung pada aspek penawaran maupun permintaan. Dari sisi penawaran, kemiskinan disebabkan oleh keterbelakangan, ketertinggalan, dan ketidaksempurnaan pasar yang berdampak pada rendahnya produktivitas, keterbatasan modal, serta minimnya investasi. Sementara itu, dari sisi permintaan, rendahnya tingkat investasi di negara miskin menghambat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan masyarakat. Kondisi ini membentuk siklus yang terus berulang, diperkuat oleh faktor-faktor alam, struktur sosial, maupun kondisi individu.

Menurut Suharto (2005) dalam memahami fenomena kemiskinan, terdapat dua kerangka pemikiran utama (*grand theory*), yaitu paradigma Neo-liberal dan paradigma Sosial Demokrasi.. Dalam konteks pendidikan, teori tersebut menjelaskan bahwa kemiskinan membatasi kesempatan siswa dalam mengakses pendidikan yang layak. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki hambatan ekonomi dan sosial yang mengarah pada putus sekolah, baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, faktor kemiskinan dapat dipandang sebagai akar dari ketidaksetaraan kesempatan pendidikan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah anak putus sekolah menurut Harahap dkk. (2022) adalah dengan memberikan pembelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berpikir mereka. Melalui layanan konseling kelompok, diharapkan dapat merangsang pemikiran anak dan membiasakan mereka dengan pola pendidikan non-akademik yang mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, beberapa solusi yang dapat diterapkan, yaitu sistem paket, kursus dan pelatihan yang dianggap efektif untuk membantu anak putus sekolah, adanya sekolah terbuka sebagai pilihan solusi untuk mengatasi permasalahan putus sekolah, serta bantuan pendidikan yang mampu memberikan dukungan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi hubungan antara kemiskinan dan angka putus sekolah. Penelitian Ridwan dkk. (2022) menyoroti hubungan erat antara kondisi ekonomi yang tidak stabil dengan meningkatnya risiko anak usia sekolah untuk putus sekolah selama pandemi. Studi yang berjudul “Implementasi Program *Campus Social Responsibility* pada Masa Pandemi Covid-19” mengindikasikan bahwa tingkat keikutsertaan sekolah pada kelompok usia 16–18 tahun di Surabaya hanya mencapai 67,33%. Kondisi ini mendorong anak-anak untuk memilih bekerja, walaupun akhirnya menambah angka pengangguran. Fokus utama penelitian ini adalah dampak langsung krisis ekonomi terhadap keberlanjutan pendidikan, menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi menjadi faktor kunci dalam keberlangsungan pendidikan anak, meskipun tidak secara langsung mengukur hubungan kemiskinan dan putus sekolah.

Penelitian Haryani (2022) dalam studinya “*Parental Income, Socio-Cultural, and Living Environment as Factors Causing Children to Drop Out of Middle School*” menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menunjukkan bahwa

pendapatan orang tua, pandangan budaya, dan lingkungan tempat tinggal memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan anak untuk berhenti sekolah. Studi ini juga memperlihatkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua turut memperkuat keputusan anak untuk tidak melanjutkan sekolah.

Aisy & Nailufar (2022), dalam penelitiannya “Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Angka Putus Sekolah terhadap Pekerja Anak di Indonesia”, menggunakan data sekunder dari BPS selama 21 tahun dan model VAR dinamis. Temuan utama menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pekerja anak, sedangkan angka putus sekolah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pekerja anak. Studi ini mengonfirmasi bahwa kemiskinan memiliki dampak luas terhadap keputusan anak untuk meninggalkan sekolah dan memasuki dunia kerja, meskipun fokusnya lebih pada anak pekerja.

Studi Padli (2023), “Anak Putus Sekolah pada Jenjang Sekolah Menengah Atas di Desa Laba”, menambahkan dimensi internal maupun eksternal yang memicu terjadinya putus sekolah.. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, Padli menemukan bahwa rendahnya motivasi belajar, kemampuan akademik, perhatian orang tua, dan pengaruh lingkungan negatif menjadi pemicu utama. Meskipun tidak mengukur pengaruh kemiskinan secara langsung, studi ini menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial-ekonomi rendah sehingga lebih rentan mengalami putus sekolah. Studi ini memberikan pembandingan kontekstual antara daerah pedesaan dan perkotaan, yang penting untuk penelitian di Banjarbaru sebagai daerah kota.

Penelitian Nurdin dkk. (2024) , dalam “*Pengaruh Keterbatasan Akses Pendidikan terhadap Tingginya Angka Putus Sekolah Dikaitkan dengan SDGs*”, memberikan perspektif makro tentang bagaimana kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan dan sumber daya menjadi hambatan utama dalam partisipasi pendidikan. Meskipun kemiskinan tidak dijadikan variabel utama, studi ini mengakui bahwa keterbatasan ekonomi memperparah hambatan struktural dalam pendidikan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi sebelumnya karena menerapkan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif komparatif untuk mengkaji pengaruh tingkat kemiskinan terhadap angka putus sekolah di Kota Banjarbaru, ditinjau dari jenjang pendidikan serta perbedaan tingkat kemiskinan antar kecamatan. Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan tren angka putus sekolah sejak tahun ajaran 2015/2016 hingga 2024/2025, dengan fokus utama pada tahun ajaran 2024/2025. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan distribusi angka putus sekolah di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Liang Anggang, dan Kecamatan Landasan Ulin. Berdasarkan kategori kemiskinan tinggi, sedang, dan rendah. Sementara itu, analisis kebijakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis data kepada pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini dapat digunakan sebagai indikator wilayah prioritas yang membutuhkan intervensi lebih intensif, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, perluasan akses beasiswa, maupun program pengurangan beban ekonomi keluarga. Dengan demikian, analisis kebijakan ini berfungsi sebagai dasar perencanaan strategis dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pendidikan, sekaligus sebagai acuan untuk menekan angka putus sekolah secara berkelanjutan di Kota Banjarbaru.

Sementara itu, penelitian oleh Ridwan dkk. (2022) hanya menggunakan pendekatan kualitatif dan fokus pada implementasi program sosial (CSR) dalam mendampingi anak-anak rentan putus sekolah selama pandemi, tanpa mengukur pengaruh langsung faktor ekonomi terhadap angka putus sekolah. Penelitian Haryani (2022) sudah menggunakan pendekatan kuantitatif, namun terbatas pada jenjang SMP dan mencakup variabel sosial-budaya serta lingkungan, bukan secara spesifik menguji pengaruh tingkat kemiskinan sebagai variabel independen utama. Penelitian oleh Aisy & Nailufar (2022) memanfaatkan data sekunder dari tahun 1999 hingga 2019, namun fokus utamanya adalah pada pekerja anak, sehingga angka putus sekolah tidak menjadi variabel dependen utama. Demikian pula, penelitian Padli (2023) hanya terbatas pada jenjang SMA dan bersifat kualitatif deskriptif tanpa analisis statistik. Adapun penelitian Nurdin dkk. (2024) menggunakan pendekatan makro dan kualitatif dengan mengaitkan isu pendidikan dan SDGs, tetapi tidak menguji hubungan antara kemiskinan dan angka putus sekolah secara spesifik. Berbeda dengan itu semua, penelitian ini mencakup periode data terbaru, menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder resmi, serta memfokuskan analisis pada pengaruh langsung tingkat kemiskinan terhadap angka putus sekolah pada jenjang SD, SMP dan SMA di lima Kecamatan di Kota Banjarbaru. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperbarui kajian sebelumnya, tetapi juga mengisi celah riset melalui pendekatan spasial dan analisis perbedaan antar wilayah berdasarkan kategori kemiskinan.

Oleh karena itu, kota Banjarbaru memiliki dinamika ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Meskipun memiliki tingkat kemiskinan menunjukkan persentase yang rendah, masih terdapat keluarga yang berada dalam garis kemiskinan, yang kemungkinan besar berpengaruh terhadap angka putus sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA. Fenomena ini menciptakan perbedaan kesempatan antara kelompok masyarakat mampu dan kurang mampu dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh tingkat kemiskinan terhadap angka putus sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA di Kota Banjarbaru selama periode tahun ajaran 2015/2016 hingga 2024/2025, walaupun lebih berfokus membahas pada tahun ajaran 2024/2025 guna memberikan rekomendasi berbasis data kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan sosial yang lebih inklusif.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat masih tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, terutama di wilayah dengan kategori kemiskinan tinggi, serta belum meratanya intervensi kebijakan pendidikan berbasis wilayah. Tanpa adanya strategi pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan program peningkatan akses dan kualitas pendidikan, anak-anak dari keluarga miskin akan terus berada dalam siklus kerentanan sosial dan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis deskriptif komparatif berbasis data sekunder dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru, Dinas Sosial Kota Banjarbaru, dan data sekolah, penelitian ini akan memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah antar kecamatan. Hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik di bidang pendidikan dan sosial, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menekan angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif komparatif dan analisis kebijakan, serta mengolah data menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga resmi, seperti Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru, Dinas Sosial Kota Banjarbaru, dan data sekolah. Data dikumpulkan dalam bentuk *time series* mulai dari tahun ajaran 2015/2016 hingga 2024/2025 melalui studi pustaka, sehingga tidak memerlukan teknik pengambilan sampel maupun penyebaran kuesioner.

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa yang tercatat sebagai anak putus sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA di 15 sekolah yang menjadi lokasi penelitian di Kota Banjarbaru selama sepuluh tahun ajaran tersebut. Pemilihan 15 sekolah dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan representasi wilayah, yaitu setiap kecamatan di Kota Banjarbaru diwakili oleh tiga jenjang pendidikan, masing-masing 5 SD, 5 SMP, dan 5 SMA. Pemilihan ini memastikan bahwa data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi angka putus sekolah di Kecamatan Kota Banjarbaru, meskipun tidak mencakup semua sekolah yang ada. Berdasarkan pendataan di 15 sekolah tersebut selama 10 tahun terakhir, tercatat total 173 anak putus sekolah, terdiri dari 79 anak pada jenjang SD, 44 anak pada jenjang SMP, dan 50 anak pada jenjang SMA.

Untuk analisis hubungan antara tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah, digunakan data tahun ajaran 2024/2025 saja. Pemilihan tahun ini berdasarkan pada ketersediaan data kemiskinan per kecamatan yang bersumber dari Dinas Sosial Kota Banjarbaru pada tahun yang sama. Pada periode tersebut, tercatat populasi anak putus sekolah sebanyak 23 anak, terdiri dari 8 anak pada jenjang SD, 4 anak pada jenjang SMP, dan 11 anak pada jenjang SMA. Penggunaan data tahun 2024/2025, pengukuran variabel dilakukan pada periode yang sama, dan distribusi data mencakup seluruh Kecamatan di Kota Banjarbaru. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat tentang keterkaitan kedua variabel.

Kategori tingkat kemiskinan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni tinggi, sedang, dan rendah, untuk memudahkan analisis perbandingan angka putus sekolah antar wilayah. Kategori tersebut ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Kategori Tingkat Kemiskinan

Kecamatan	Jumlah Fakir Miskin (Jiwa)	Kategori Kemiskinan
Kecamatan Cempaka	3.471	Tinggi
Kecamatan Landasan Ulin	2.388	Sedang
Kecamatan Banjarbaru Utara	1.087	Rendah

Sumber: Data Dinas Sosial yang telah diolah

Berdasarkan Tabel 1 tingkat kemiskinan dilihat dari data Dinas Sosial Kota Banjarbaru kategori tingkat kemiskinan tinggi ada di Kecamatan Cempaka sebanyak 3.471 jiwa, kategori tingkat kemiskinan sedang ada di Kecamatan Landasan Ulin sebanyak 2.388 jiwa, dan kategori tingkat kemiskinan rendah ada di Kecamatan Banjarbaru Utara sebanyak 1.087 jiwa.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif komparatif, yakni mengamati perbedaan tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah antar jenjang pendidikan serta antar kecamatan di Kota Banjarbaru. Hubungan antara variabel tingkat kemiskinan (X) dan angka putus sekolah (Y) diukur melalui perbandingan tren dari tahun ke tahun, visualisasi grafik, dan rasio tingkat putus sekolah pada kategori kemiskinan tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu, analisis hubungan dilakukan dengan membandingkan angka putus sekolah antar-kecamatan pada kategori tingkat kemiskinan

yang berbeda untuk melihat pola distribusi secara spasial. Analisis ini tidak menggunakan uji signifikansi statistik, tetapi cukup untuk menjelaskan fenomena yang diamati secara empiris.

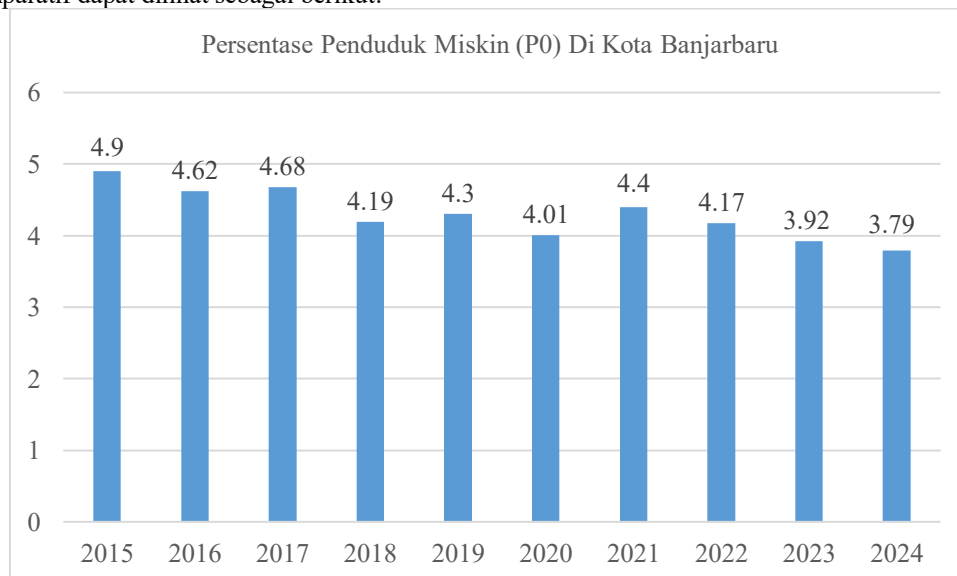
Penelitian ini juga menggunakan analisis kebijakan. Menurut Nugroho (2014) dalam Ulfah & Huda (2024), penelitian kebijakan adalah studi yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan, serta konteks kebijakan. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian kebijakan melibatkan pengumpulan data dalam bentuk angka atau variabel yang dapat diukur. Data tersebut kemudian dianalisis secara statistik untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan ini biasanya mencakup desain studi yang terstruktur, pemilihan sampel yang representatif, dan penerapan teknik analisis yang sesuai untuk menguji hipotesis atau hubungan antar variabel. Tujuan utama dari pendekatan kuantitatif dalam penelitian kebijakan adalah untuk menyediakan bukti empiris yang kuat yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Dengan memanfaatkan data kuantitatif, peneliti dapat mengidentifikasi tren, mengukur dampak kebijakan, dan meramalkan hasil dari berbagai pilihan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

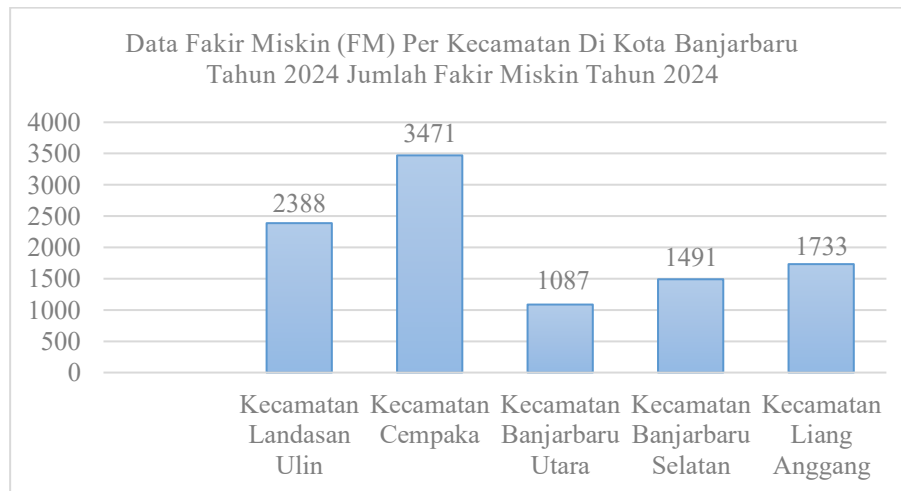
Analisis Deskriptif

Persentase penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru menunjukkan tren penurunan selama periode 2015–2024. Data Badan Pusat Statistik mencatat penurunan dari 4,9% pada tahun 2015 menjadi 3,79% pada tahun 2024, dengan fluktuasi kecil pada tahun 2021 sebesar 4,4%. Distribusi jumlah fakir miskin menurut data Dinas Sosial tahun 2024 memperlihatkan bahwa Kecamatan Cempaka memiliki jumlah tertinggi, yaitu 3.471 jiwa, diikuti Kecamatan Landasan Ulin sebanyak 2.388 jiwa, Kecamatan Liang Anggang 1.733 jiwa, Kecamatan Banjarbaru Selatan 1.491 jiwa, dan Kecamatan Banjarbaru Utara 1.087 jiwa. Perbedaan jumlah tersebut menunjukkan variasi tingkat kemiskinan antar kecamatan di Kota Banjarbaru.

Angka putus sekolah di Kota Banjarbaru menunjukkan fluktuasi selama periode tahun ajaran 2015/2016 hingga 2024/2025. Berdasarkan data sekolah, jenjang SD mencatat angka putus sekolah tertinggi pada beberapa tahun, khususnya di Kecamatan Cempaka. Data alasan putus sekolah yang diperoleh dari sekolah menunjukkan bahwa faktor dominan adalah lulus tetapi tidak melanjutkan sekolah, diikuti alasan bekerja, dan tidak masuk sekolah lagi. Mengenai hasil uji statistik deskriptif komparatif dapat dilihat sebagai berikut:



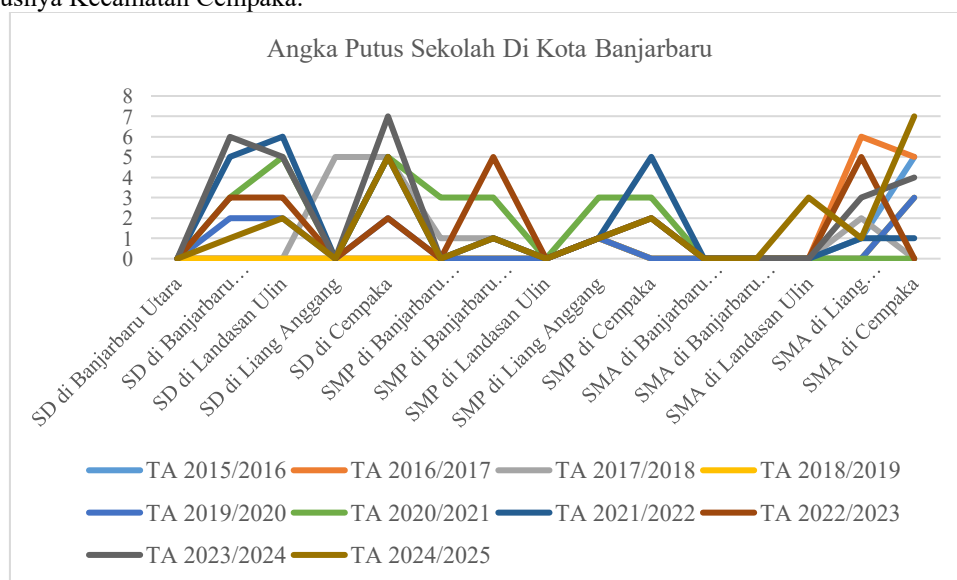
Gambar 1 Persentase Penduduk Miskin (P0) Di Kota Banjarbaru
Sumber : bps.go.id yang telah diolah



Gambar 2 Data Fakir Miskin (FM) Per Kecamatan Di Kota Banjarbaru Tahun 2024 Jumlah Fakir Miskin Tahun 2024
Sumber : Data Dinas Sosial yang telah diolah

Berdasarkan Gambar 1 persentase penduduk miskin (P0) di Kota Banjarbaru menunjukkan tren menurun dalam periode 2015–2024. Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 4,9% dan kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga 4,01% pada 2020. Meskipun terjadi sedikit kenaikan pada 2021 menjadi 4,4%, angka ini kembali menurun hingga mencapai titik terendah pada 2024 sebesar 3,79%. Penurunan ini mengindikasikan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang didukung faktor ekonomi, sosial, dan peningkatan akses pendidikan, yang secara keseluruhan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan data BPS yang bersifat agregat tahunan, data Dinas Sosial pada Gambar 2 memberikan gambaran spasial kemiskinan di tingkat kecamatan pada tahun 2024. Hasilnya menunjukkan distribusi yang tidak merata, di mana Kecamatan Cempaka mencatat jumlah fakir miskin tertinggi sebanyak 3.471 jiwa, disusul Kecamatan Landasan Ulin sebanyak 2.388 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Liang Anggang sebanyak 1.733 jiwa dan Banjarbaru Selatan sebanyak 1.491 jiwa berada pada kategori lebih rendah, dan Banjarbaru Utara memiliki jumlah fakir miskin terendah sebanyak 1.087 jiwa. Perbedaan spasial ini menegaskan bahwa meskipun tren kemiskinan secara keseluruhan menurun, konsentrasi kemiskinan di wilayah tertentu tetap tinggi, sehingga memerlukan kebijakan intervensi yang lebih terfokus di daerah prioritas, khususnya Kecamatan Cempaka.

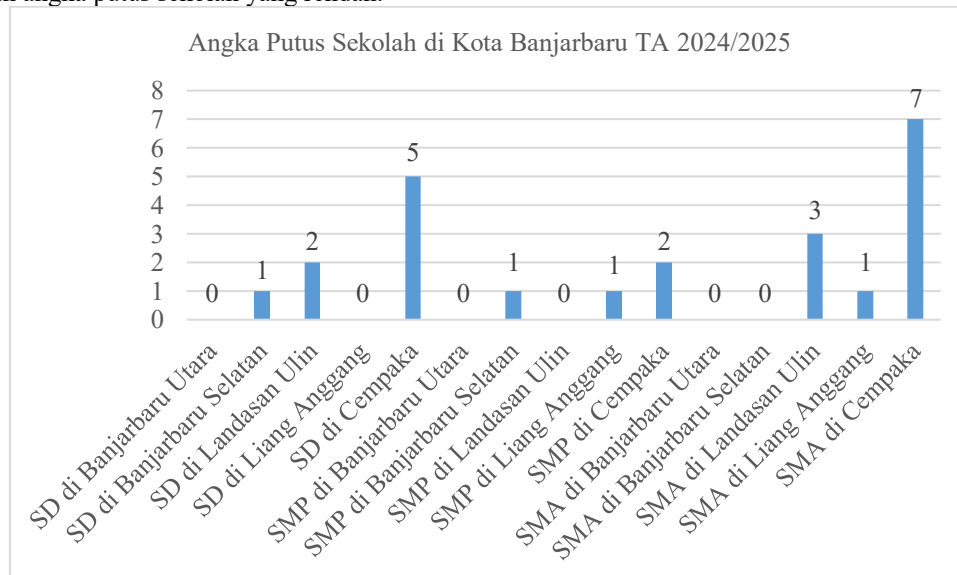


Gambar 3 Angka Putus Sekolah Di Kota Banjarbaru TA 2015/2016 - TA 2024/2025
Sumber : Data sekolah yang telah diolah

Berdasarkan Gambar 3, angka putus sekolah di Kota Banjarbaru pada periode 10 tahun ajaran terakhir menunjukkan pola fluktuatif. Peningkatan terjadi dari tahun ajaran 2015/2016 hingga 2017/2018, kemudian menurun pada tahun ajaran 2018/2019 yang menjadi titik terendah, sebelum kembali meningkat pada tahun ajaran 2019/2020 hingga tahun ajaran 2021/2022. Puncak tertinggi tercatat pada 2023/2024, disusul penurunan pada 2024/2025. Kategori sedang ditemukan pada tahun ajaran 2020/2021 hingga tahun ajaran 2021/2022, sementara kategori rendah terjadi pada tahun ajaran

2018/2019. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat periode penurunan, tantangan untuk mempertahankan siswa agar menyelesaikan pendidikan masih signifikan pada tahun-tahun tertentu.

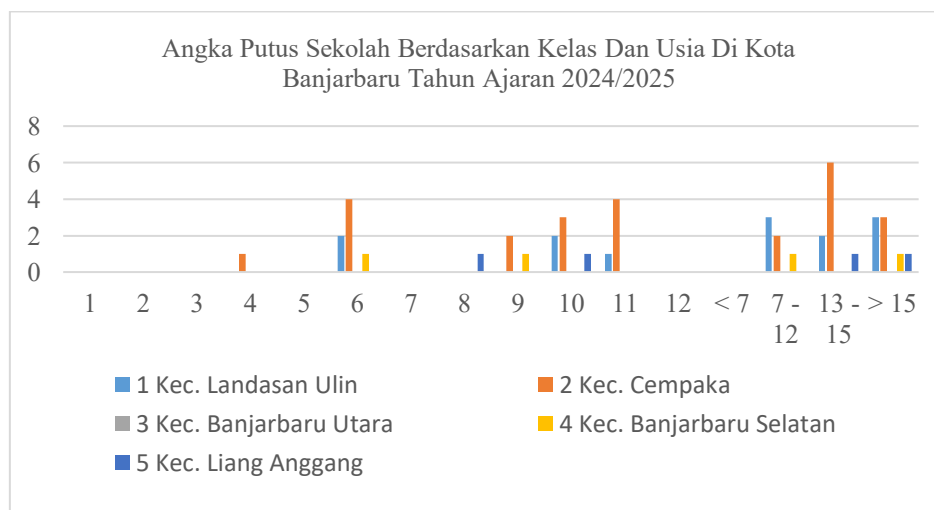
Analisis berdasarkan wilayah dan jenjang pendidikan mengungkapkan bahwa angka putus sekolah tertinggi berada pada jenjang SD di Kecamatan Cempaka dengan 31 anak putus sekolah, diikuti kategori sedang pada jenjang SMA di kecamatan yang sama sebanyak 28 anak putus sekolah. Sementara itu, kategori rendah ditemukan pada jenjang SD di Banjarbaru Utara, SMP di Landasan Ulin, serta SMA di Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan. Perbedaan ini menegaskan adanya ketimpangan antar wilayah, sehingga diperlukan intervensi pendidikan yang lebih terfokus pada daerah dengan tingkat putus sekolah tinggi, khususnya di Kecamatan Cempaka, serta replikasi strategi yang berhasil di wilayah dengan angka putus sekolah yang rendah.



Gambar 4 Angka Putus Sekolah di Kota Banjarbaru TA 2024/2025

Sumber : Data sekolah yang telah diolah

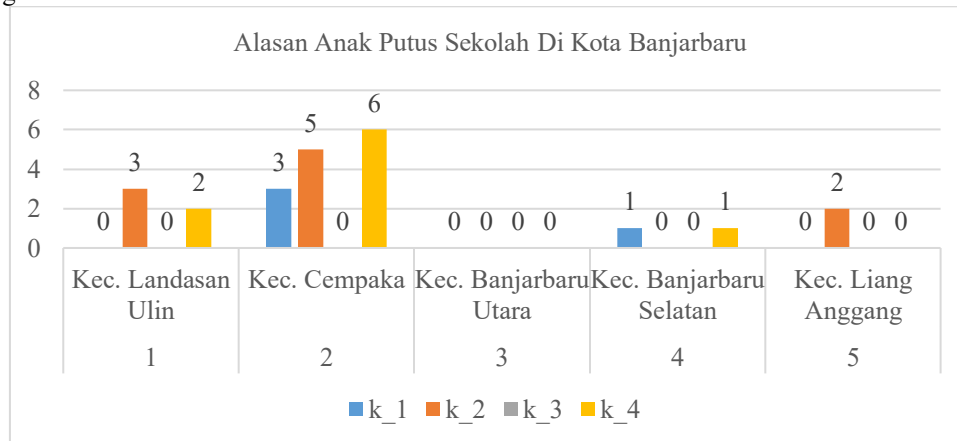
Berdasarkan Gambar 4 yang didapat dari data 15 sekolah menunjukkan data angka putus sekolah di Kota Banjarbaru tahun ajaran 2024/2025 berdasarkan jenjang pendidikan dan wilayah Kecamatan. Data tersebut menunjukkan angka putus sekolah tertinggi tercatat pada jenjang SD di Kecamatan Cempaka dengan jumlah 5 anak putus sekolah, diikuti oleh jenjang SMP di kecamatan yang sama sebanyak 2 anak putus sekolah, serta jenjang SMA di Kecamatan Cempaka dengan 7 anak putus sekolah. Sementara itu, tidak terdapat kasus putus sekolah pada jenjang SD di Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Liang Anggang. Untuk jenjang SMP, wilayah yang tidak mengalami putus sekolah adalah Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Landasan Ulin. Adapun pada jenjang SMA, Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Banjarbaru Selatan tercatat tanpa kasus putus sekolah. Secara keseluruhan, kasus putus sekolah lebih banyak terjadi pada jenjang SD dan SMA, yang mengindikasikan adanya hambatan lanjutan dalam proses melanjutkan pendidikan.



Gambar 5 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Kelas Dan Usia Di Kota Banjarbaru Tahun Ajaran 2024/2025

Sumber : Data sekolah yang telah diolah

Berdasarkan Gambar 5 data dari sekolah angka putus sekolah berdasarkan kelas dan usia di Kota Banjarbaru tahun ajaran 2024/2025, terlihat bahwa jumlah siswa yang paling banyak mengalami putus sekolah terjadi pada usia 13 sampai 15 tahun, dengan dominasi tertinggi berasal dari Kecamatan Cempaka sebanyak 6 orang. Selain itu, usia diatas dari 7 tahun hingga 12 tahun juga mencatat jumlah putus sekolah yang cukup signifikan, khususnya dari Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang. Jika dilihat berdasarkan kelas, lonjakan kasus terjadi di kelas 6, kelas 10, dan kelas 11. Hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan faktor ekonomi atau kesiapan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Secara umum, Kecamatan Cempaka paling konsisten mengalami angka putus sekolah tinggi di berbagai kelas dan rentang usia, sedangkan Kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan menunjukkan angka yang lebih rendah dan cenderung stabil. Data ini menunjukkan bahwa transisi antar jenjang pendidikan merupakan momen krusial di mana risiko putus sekolah meningkat.



Gambar 6 Alasan Anak Putus Sekolah Di Kota Banjarbaru TA 2024/2025
Sumber : Data sekolah yang telah diolah

Keterangan Alasan Gambar 4.10 :

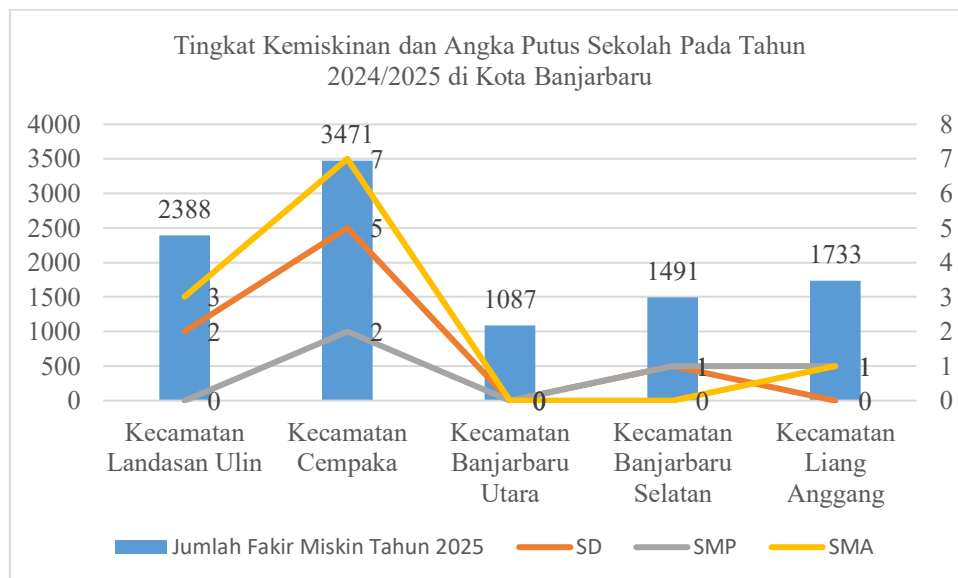
k_1. Tidak Masuk Sekolah Lagi

k_2. Bekerja

k_3. Menikah

k_4. Lulus Tapi Tidak Melanjutkan Sekolah

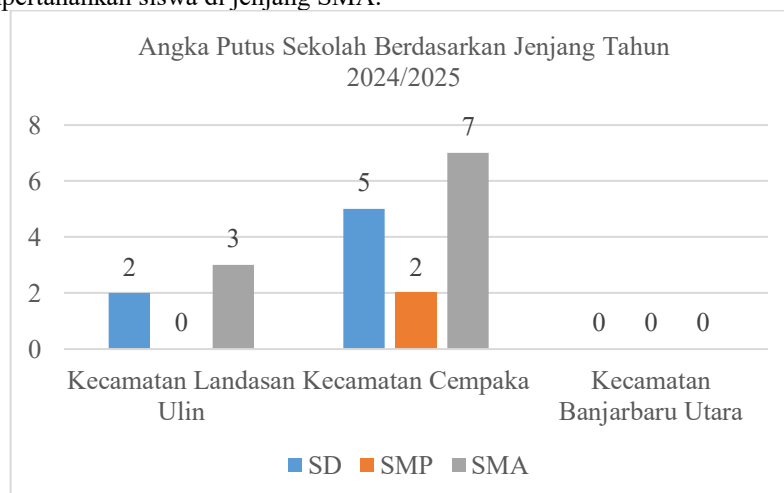
Berdasarkan data pada Gambar 4.10 alasan yang paling banyak ditemukan adalah Lulus Tapi Tidak Melanjutkan Sekolah (k_4), terutama terjadi di Kecamatan Cempaka sebanyak 6 orang. Diikuti oleh alasan bekerja (k_2), yang muncul di seluruh Kecamatan, dengan angka tertinggi di Kecamatan Cempaka dan Landasan Ulin. Alasan Tidak Masuk Sekolah Lagi (k_1) juga tercatat cukup signifikan, khususnya di Kecamatan Cempaka sebanyak 3 orang. Sementara itu, alasan menikah (k_3) tidak ada di Tahun Ajaran 2024/2025. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan berperan besar terhadap keputusan anak untuk berhenti sekolah, baik karena harus bekerja, merasa cukup dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh, maupun tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan.



Gambar 7 Tingkat Kemiskinan dan Angka Putus Sekolah Pada Tahun 2024/2025 di Kota Banjarbaru
Sumber : Data sekolah yang telah diolah

Berdasarkan Gambar 7, tingkat kemiskinan terbukti berpengaruh terhadap angka putus sekolah di berbagai Kecamatan di Kota Banjarbaru pada tahun ajaran 2024/2025. Kecamatan dengan kategori kemiskinan tinggi, seperti Kecamatan Cempaka yang memiliki 3.471 jiwa masyarakat miskin, mencatat angka putus sekolah tertinggi pada jenjang SMA. Kecamatan dengan kategori kemiskinan sedang, seperti Kecamatan Landasan Ulin sebanyak 2.388 jiwa, juga menunjukkan adanya putus sekolah pada jenjang SD dan SMA, meskipun tidak setinggi Kecamatan Cempaka. Sementara itu, Kecamatan Banjarbaru Utara yang memiliki 1.087 jiwa masyarakat miskin kategori rendah menunjukkan angka putus sekolah yang relatif rendah.

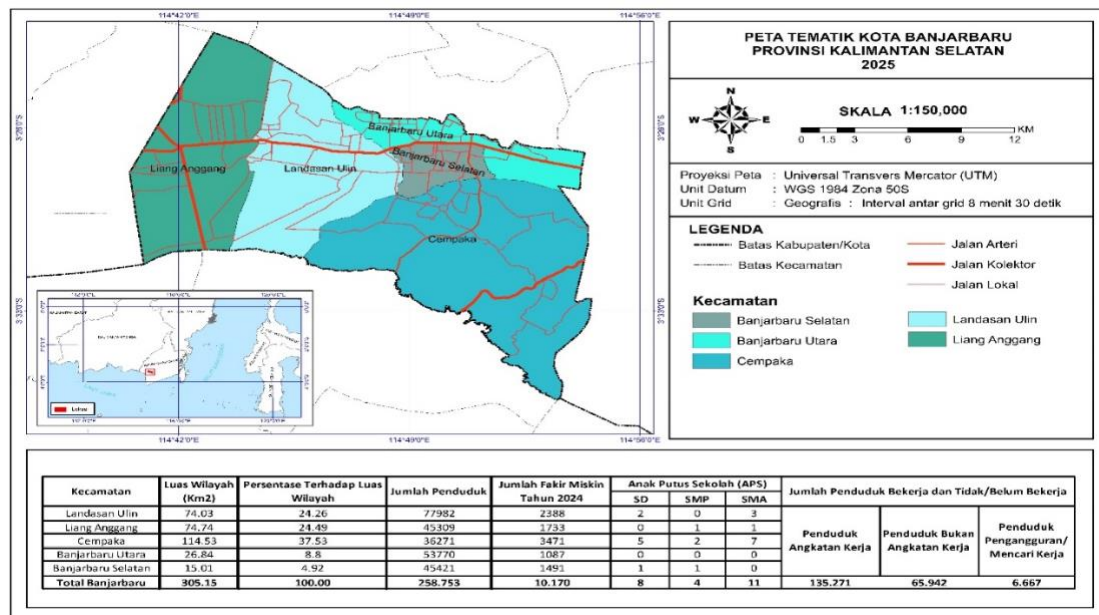
Analisis ini mengindikasikan hubungan positif antara tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah, di mana semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar kemungkinan anak keluar dari sekolah, terutama di tingkat SMA. Sebaliknya, wilayah dengan kategori kemiskinan rendah cenderung memiliki angka putus sekolah yang rendah di semua jenjang pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa perbaikan kondisi ekonomi masyarakat berperan penting dalam menekan angka putus sekolah, serta bahwa intervensi pendidikan perlu difokuskan pada wilayah dengan kemiskinan tinggi, khususnya untuk mempertahankan siswa di jenjang SMA.



Gambar 8 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Tahun 2024/2025
Sumber : Data sekolah yang telah diolah

Berdasarkan data pada Gambar 8, angka putus sekolah di Kota Banjarbaru tahun ajaran 2024/2025 ditampilkan menurut jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dengan perbandingan antar kecamatan. Kecamatan Cempaka mencatat angka putus sekolah tertinggi, yakni 14 anak putus sekolah, terdiri dari 5 anak putus sekolah di jenjang SD, 2 anak putus sekolah di jenjang SMP, dan 7 anak putus sekolah di jenjang SMA. Kecamatan Landasan Ulin berada pada kategori sedang dengan total 5 anak putus sekolah, meliputi 2 anak putus sekolah di SD dan 3 anak putus sekolah di SMA, tanpa kasus pada jenjang SMP. Sementara itu, Kecamatan Banjarbaru Utara menunjukkan capaian terbaik dengan nol kasus

putus sekolah di seluruh jenjang. Temuan ini mengindikasikan bahwa angka putus sekolah cenderung lebih tinggi pada wilayah dengan tingkat kemiskinan yang juga tinggi, terutama pada jenjang pendidikan menengah atas.



Gambar 9 Peta Tematik Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan 2025

Sumber : Data BPS dan data sekolah yang telah diolah

Berdasarkan Gambar 9 Peta Tematik Kota Banjarbaru memiliki 135.271 jiwa penduduk angkatan kerja, sebanyak 65.942 jiwa penduduk bukan angkatan kerja, dan 6.667 jiwa pengangguran. Tingginya jumlah penduduk angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan, yang pada gilirannya mendorong anak-anak dari keluarga kurang mampu terpaksa putus sekolah untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini menegaskan adanya keterkaitan antara pengangguran, kemiskinan, dan angka putus sekolah, sehingga diperlukan upaya penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perluasan akses pendidikan sebagai langkah strategis memutus siklus kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Analisis spasial menunjukkan perbedaan signifikan antar kecamatan. Kecamatan Cempaka, dengan luas wilayah 114,53 km² dan 36.271 jiwa penduduk, memiliki tantangan ekonomi tertinggi dengan 3.471 jiwa fakir miskin dan 14 anak putus sekolah. Kecamatan Landasan Ulin yang berpenduduk paling banyak 77.982 jiwa mencatat 2.388 jiwa fakir miskin kategori sedang dan 5 anak putus sekolah. Sebaliknya, Kecamatan Banjarbaru Utara dengan 53.770 jiwa penduduk memiliki tingkat kemiskinan terendah sebanyak 1.087 jiwa fakir miskin dan tidak ditemukan kasus putus sekolah. Perbedaan ini menunjukkan perlunya intervensi prioritas di Kecamatan Cempaka melalui penguatan pendidikan dan penyediaan lapangan kerja, sementara strategi keberhasilan Banjarbaru Utara dapat dijadikan model untuk wilayah lain yang masih menghadapi tingkat kemiskinan dan putus sekolah tinggi.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Putus Sekolah Pada Jenjang SD, SMP, dan SMA di Kota Banjarbaru

Tingkat kemiskinan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap angka putus sekolah di Kota Banjarbaru. Data pada Gambar 7 menunjukkan jumlah fakir miskin tertinggi berada di Kecamatan Cempaka sebanyak 3.471 jiwa, disusul Kecamatan Landasan Ulin sebanyak 2.388 jiwa, dan terendah di Kecamatan Banjarbaru Utara sebanyak 1.087 jiwa. Wilayah dengan jumlah fakir miskin yang tinggi cenderung memiliki angka putus sekolah lebih besar, khususnya pada jenjang SMA. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kota Banjarbaru meliputi fluktuasi laju pertumbuhan penduduk, dari 2,92% pada 2017 turun menjadi 1,57% pada 2021, lalu meningkat menjadi 3,25% pada 2020–2023. Adapun distribusi penduduk yang tidak merata, dominasi pekerjaan buruh/karyawan/pegawai menjadi 56,61%, serta peningkatan pengeluaran per kapita dari Rp14.524,00 pada 2023 menjadi Rp14.927,00 pada 2024 (Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru, 2024; Bapperida, 2021).

Kondisi ini sejalan dengan temuan (Nursita & Edy P, 2022) yang menyatakan bahwa kemiskinan berdampak langsung terhadap perkembangan pendidikan, di mana putus sekolah menjadi salah satu manifestasinya. Pada Tahun Ajaran 2024/2025, Kecamatan Cempaka dengan tingkat kemiskinan tertinggi mencatat 7 siswa putus sekolah di jenjang SMA, sedangkan Kecamatan Banjarbaru Utara dengan tingkat kemiskinan terendah hampir tidak memiliki kasus putus sekolah. Hal ini sesuai dengan teori Maslow (Nurkhasyanah dkk., 2022) yang menjelaskan bahwa kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan akan selalu didahulukan dibandingkan kebutuhan aktualisasi diri seperti pendidikan, sehingga keluarga miskin cenderung mengutamakan kebutuhan pokok dan mengesampingkan keberlanjutan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Terdapat Perbedaan Signifikan Dalam Angka Putus Sekolah Antara Kecamatan Yang Memiliki Tingkat Kemiskinan Yang Berbeda Di Kota Banjarbaru

Data pada Gambar 7 menunjukkan perbedaan signifikan dalam angka putus sekolah antar kecamatan dengan tingkat kemiskinan yang berbeda. Kecamatan Cempaka, dengan jumlah fakir miskin tertinggi sebesar 3.471 jiwa, mencatat 14 anak putus sekolah. Kecamatan Landasan Ulin yang memiliki 2.388 jiwa fakir miskin mencatat 5 anak putus sekolah, sedangkan Kecamatan Banjarbaru Utara dengan 1.087 jiwa secara konsisten memiliki angka putus sekolah yang rendah di seluruh jenjang. Temuan ini menegaskan bahwa distribusi angka putus sekolah tidak merata antar kecamatan dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi wilayah. Penelitian (Ramadhan dkk., 2025) juga menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat berpengaruh terhadap tingginya kasus anak putus sekolah.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui teori konflik Karl Marx dalam (Dilla Gusti Elfira dkk., 2023) yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan pendidikan muncul akibat distribusi kekayaan dan sumber daya yang tidak merata. Dalam konteks ini, siswa dari keluarga berpendapatan rendah kerap menjadi korban sistem yang tidak adil, sehingga terjebak dalam siklus kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi berimplikasi langsung pada rendahnya keberlanjutan pendidikan, terutama di wilayah dengan akses dan sumber daya terbatas.

Pengaruh Kategori Kemiskinan Tinggi Terhadap Angka Putus Sekolah

Berdasarkan Gambar 7, Kecamatan Cempaka sebagai wilayah dengan kategori kemiskinan tertinggi sebanyak 3.471 jiwa menunjukkan angka putus sekolah yang konsisten tinggi di jenjang SD, SMP, dan SMA. Data sekolah mencatat 5 siswa putus sekolah di jenjang SD, 2 siswa di SMP, dan 7 siswa di SMA, dengan dominasi kasus pada jenjang SD dan SMA. Temuan ini menunjukkan keterkaitan langsung antara tingginya tingkat kemiskinan dengan besarnya angka putus sekolah di wilayah tersebut.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian (Khairani dkk., 2025) yang menemukan bahwa tingkat kemiskinan menjadi hambatan utama bagi anak-anak di Papua untuk melanjutkan pendidikan. Selaras dengan teori Durkheim dalam (Arif, 2025) bahwa kurangnya dukungan dari struktur sosial seperti faktor ekonomi dan budaya dapat menghambat individu dalam memprioritaskan pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa kemiskinan tidak hanya berdampak pada kemampuan ekonomi keluarga, tetapi juga pada keberlangsungan pendidikan anak.

Pengaruh Kategori Kemiskinan Sedang Terhadap Angka Putus Sekolah

Berdasarkan Gambar 7, Kecamatan Landasan Ulin yang termasuk kategori kemiskinan sedang dengan jumlah fakir miskin sebanyak 2.388 jiwa tetap menunjukkan keterkaitan dengan angka putus sekolah. Data sekolah mencatat 2 siswa putus sekolah di jenjang SD dan 3 siswa di jenjang SMA. Meskipun jumlah ini lebih rendah dibandingkan Kecamatan Cempaka, temuan ini menunjukkan bahwa kategori kemiskinan sedang tetap berdampak pada keberlangsungan pendidikan peserta didik. Hal ini didukung oleh penelitian (Padli, 2023) yang menyatakan bahwa meskipun pendidikan diwajibkan 12 tahun, faktor sosial-ekonomi masih menjadi tantangan besar dalam pemerataan pendidikan.

Sejalan dengan teori modal manusia (*human capital theory*) yang dikemukakan Becker (1993) dalam (Aulia dkk., 2025) bahwa pendidikan dipandang sebagai investasi yang meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas individu. Dalam konteks ini, meskipun berada pada kategori kemiskinan sedang, hambatan ekonomi tetap mempengaruhi akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Kondisi tersebut dapat berkontribusi pada terjadinya putus sekolah, khususnya di jenjang pendidikan yang memerlukan biaya lebih besar.

Pengaruh Kategori Kemiskinan Rendah Terhadap Angka Putus Sekolah

Berdasarkan Gambar 7, Kecamatan Banjarbaru Utara yang berada pada kategori kemiskinan rendah dengan jumlah fakir miskin sebanyak 1.087 jiwa menunjukkan angka putus sekolah yang sangat rendah, bahkan pada tahun ajaran 2024/2025 tidak tercatat adanya anak putus sekolah di jenjang SD, SMP, maupun SMA. Temuan ini mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat kemiskinan berkontribusi positif terhadap keberlangsungan pendidikan. Penelitian (Selvia & Yeniwati, 2020) mendukung hasil ini, bahwa kemiskinan mempengaruhi putus sekolah dan sebaliknya, putus sekolah juga mempengaruhi kemiskinan, menunjukkan adanya hubungan kausal antara kedua variabel tersebut.

Fenomena ini sejalan dengan teori John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) yang dikutip oleh D. Susanto dkk (2025), yang menekankan prinsip *justice as fairness* dan distribusi sumber daya yang adil, termasuk pendidikan. Rendahnya kemiskinan membuka peluang terciptanya sistem pendidikan yang setara, seharusnya semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya angka putus sekolah serta peningkatan tingkat pendidikan secara keseluruhan.

Kebijakan Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar (PIP)

Berdasarkan data penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2025 di Kota Banjarbaru, pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai kepada siswa dari keluarga miskin sebagai upaya menekan angka putus sekolah akibat kemiskinan. Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, namun distribusinya belum merata di seluruh kecamatan. Di Kecamatan Cempaka yang memiliki tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah tinggi (3.471 jiwa fakir miskin, 14 siswa putus sekolah), penerima PIP tercatat 123 siswa SD, 67 siswa SMP, dan 47 siswa SMA. Kecamatan Landasan Ulin dengan kemiskinan kategori sedang (2.388 jiwa fakir miskin, 5 siswa putus sekolah) menerima PIP untuk

86 siswa SD, 87 siswa SMP, dan 2 siswa SMA. Sementara itu, Kecamatan Banjarbaru Utara dengan kemiskinan kategori rendah (1.087 jiwa fakir miskin, tanpa siswa putus sekolah) mendapatkan PIP untuk 50 siswa SD, 54 siswa SMP, dan 21 siswa SMA. Distribusi PIP ini menunjukkan kecenderungan sesuai kategori tingkat kemiskinan, namun efektivitasnya masih terbatas. Meskipun kebijakan ini telah berdampak positif terhadap keberlangsungan pendidikan siswa kurang mampu, pelaksanaannya belum optimal. Pemerintah daerah perlu memperkuat validasi data, memperluas cakupan penerima, dan melengkapi program dengan intervensi lain seperti subsidi transportasi, bantuan seragam, serta bimbingan belajar gratis agar kebijakan lebih menyentuh akar masalah kemiskinan dan mampu mencegah putus sekolah (Kemendikdasmen, 2025).

Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Dari sisi makro, kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru dalam menurunkan kemiskinan diarahkan melalui pertumbuhan ekonomi inklusif yang diperkirakan mencapai 6–8% per tahun hingga 2025. Strategi ini bertumpu pada penguatan sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan UMKM. Jika berhasil dilaksanakan secara konsisten, strategi ini akan meningkatkan kesejahteraan dan secara tidak langsung memperluas akses pendidikan masyarakat (Pemko, 2011).

Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 dan UU No. 11 Tahun 2009 telah memberikan bantuan berupa tunai bersyarat kepada masyarakat yang termasuk ke dalam keluarga miskin. Adapun dampak jangka panjang dan jangka pendek dari Program PKH dalam membantu meringankan beban ekonomi serta membentuk generasi yang lebih cerdas dan sehat. Penerapan PKH di Banjarbaru menjadi contoh kebijakan sosial yang dapat diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan untuk mencegah putus sekolah (BPS, 2024).

Data BPS menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Banjarbaru memiliki pengeluaran bulanan per kapita di atas Rp1.000.000, namun masih ada kelompok yang berada di kisaran Rp500.000–Rp749.000 sebanyak 8,81% dan hkan di bawah Rp500.000 sebesar 1,11%. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok miskin dan rentan masih eksis dan membutuhkan intervensi yang tepat sasaran, termasuk dalam bidang Pendidikan (Rizayani dkk., 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis hubungan tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah di Kota Banjarbaru, ditemukan bahwa ketimpangan ekonomi wilayah memiliki korelasi kuat dengan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, khususnya pada jenjang SMA. Kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti Cempaka, cenderung mencatat angka putus sekolah lebih besar dibandingkan wilayah dengan tingkat kemiskinan sedang atau rendah. Temuan ini menegaskan bahwa semakin rendah kondisi ekonomi rumah tangga, semakin besar risiko anak mengalami putus sekolah. Hasil penelitian ini mendukung teori kemiskinan struktural yang menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya ekonomi membatasi akses dan keberlanjutan pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan dasar bagi perencanaan intervensi berbasis data antar-kecamatan untuk memprioritaskan alokasi anggaran pendidikan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Program bantuan pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberi dampak positif, namun perlu diperkuat melalui validasi data penerima dan perluasan cakupan bantuan. Pendekatan kebijakan yang adaptif ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sekaligus mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah di Kota Banjarbaru.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu penggunaan data tahunan yang bersifat umum dan tidak memuat data per individu, serta belum dilakukannya uji statistik inferensial untuk mengukur kekuatan hubungan secara lebih presisi. Untuk penelitian berikutnya, disarankan menggunakan data per individu atau data panel agar dapat dilakukan analisis jangka panjang, serta mempertimbangkan metode analisis yang lebih mendetail untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab putus sekolah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi hubungan antara kemiskinan dan putus sekolah

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, R. D., & Nailufar, F. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Angka Putus Sekolah Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 11(1), 21. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v11i1.7727>
- Arif, A. M. (2025). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan. *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2, h. 1-14*, 1(2), 1–14. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PERSPEKTIF+TEORI+SOSIAL+EMILE+DURKHEIM+DALAM+SOSIOLOGI+PENDIDIKAN&btnG=
- Aulia, A. N., Karim, M. Y., Farliana, N., Ekonomi, F., Semarang, U. N., & Semarang, K. (2025). Pengaruh Pendidikan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Sektor Industri Manufaktur. *JurnalSains Student Research*, 3(3), 360–368. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pendidikan+Terhadap+Produktivitas

- +Tenaga+Kerja+di+Sektor+Industri&btnG=
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. (2024). *Kota Banjarbaru Dalam Angka 2024 Banjarbaru Municipality In Figures 2024*. <https://banjarbarukota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/ab1b0f3030f2cca6fe194eee/kota-banjarbaru-dalam-angka-2024.html>
- Bapperida. (2021). *Data Kependudukan*. <https://bapperida.banjarbarukota.go.id/data/kependudukan/>
- BPS. (2024). *Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah), 2024*. BPS. <https://banjarbarukota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIyIzI=/rata-rata-pengeluaran-per-kapita-sebulan-menurut-kelompok-komoditas.html>
- Dilla Gusti Elfira, Silfia Hanani, Aisyah Syafitri, Muaddyl Akhyar, & Nur Indri Yani Harahap. (2023). Teori Karl Marx dan Redistribusi Sumber Daya Pendidikan: Meninjau Manajemen Pendidikan yang Berorientasi Keadilan Sosial. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(1), 197–209. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i1.1190>
- Harahap, A. C. P., Lasambouw, S. P., & Aisyah, S. (2022). Analisis Layanan Konseling Kelompok dalam Memberikan Edukasi Tentang Pendidikan Anak-Anak Pesisir Dengan Latar Belakang Ekonomi Rendah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 2371–2376. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5795>
- Haryani, D. (2022). Parental Income, Socio-Cultural, and Living Environment as Factors Causing Children to Drop Out of Middle School in Rengat Barat District. *Journal of Educational Sciences*, 1(1), 157–175. Haryani, D. (2022). Parental Income, Socio-Cultural, and Living Environment as Factors Causing Children to Drop Out of Middle School in Rengat Barat District. *Journal of Educational Sciences*, 1(1), 157–175.
- Kemendikdasmen. (2025). *Penyaluran PIP Kota Banjarbaru*. Pip.Kemendikdasmen.Go.Id. <https://pip.kemendikdasmen.go.id/penyaluran/kecamatan/1561?tahun=2025>
- Khairani, A., Hakiki, N. I., & Yopan, M. (2025). Analisis Faktor Penyebab Angka Putus Sekolah di Tingkat SD dan SMP di Papua: Kajian Studi Pustaka Berbasis Teori Struktural. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), 45–51. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.6510>
- Nurdin, A. A., Mawaddah, A. R., Abdullah, N. P., Yadilla, N., & Aini, Q. (2024). Jurnal Ilmiah Multidisiplin Pengaruh Keterbatasan Akses Pendidikan Terhadap Tingginya Angka Putus Sekolah Dikaitkan Dengan SDGs. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), 660–674. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13910663>
- Nurkhasyanah, A., Yurita, H. O., & Rifda, A. N. (2022). Analisis Kondisi Ekomomi Orang Tua Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Anak Dalam Perkembangan Anak. *JOECES Journal of Early Childhood Education Studies*, 2(2022), 88–103. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Analisis+Kondisi+Ekomomi+Orang+Tua+Terhadap+Pemenuhan+Kebutuhan+Anak+Dalam+Perkembangan+Anak&btnG=
- Nursita, L., & Edy P, B. S. (2022). Pendidikan Pekerja Anak: Dampak Kemiskinan Pada Pendidikan. *Jambura : Economic Education Journal*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.37479/jeej.v4i1.11894>
- Padli, F. (2023). Anak Putus Sekolah pada Jenjang Sekolah Menengah Atas di Desa Laba. *Jurnal Konsepsi*, 11(4), 488–499. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Anak+Putus+Sekolah+pada+Jenjang+Sekolah+Menengah+Atas+di+Desa+Laba&btnG=
- Pemko. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banjarbaru 2005-2025*. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru. [https://id.scribd.com/document/410252349/RPJPD-Kalsel-2005-2025-pdf#:~:text=Rencana+Pembangunan+Jangka+Panjang+Provinsi+Kalimantan+Selatan+2005-2025,-2.1.&text=buah+PTS+dimana+sebagian+besar+berada+di+ibukota+Propinsi+Kalimantan+Selatan.&text=merupakan+sa](https://id.scribd.com/document/410252349/RPJPD-Kalsel-2005-2025-pdf#:~:text=Rencana%20Pembangunan%20Jangka%20Panjang%20Provinsi%20Kalimantan%20Selatan%202005-2025,-2.1.&text=buah%20PTS%20dimana%20sebagian%20besar%20berada%20di%20ibukota%20Propinsi%20Kalimantan%20Selatan.&text=merupakan%20sa)
- Rahman, A., & Alamsyah, M. F. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Konsumsi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Migran Di Kota Makassar. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1), 111. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9546>
- Ramadhan, D., Qatrunnada, A. A., Aprilia, A., & Lukitoaji, B. D. (2025). Pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap angka kasus anak putus sekolah di Indonesia. *EDUCREATIVA : Jurnal Seputar Isu Dan Inovasi Pendidikan*, 1(1), 99–107. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+ketimpangan+ekonomi+terhadap+angka+kasus+anak+putus+sekolah+di&btnG=
- Ridwan, A., Sholihah, Q., & Wike. (2022). Implementasi Program Campus Social Responsibility (CSR) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pendampingan Anak Rentan Putus Sekolah di Kota Surabaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 008(01), 23–34. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.01.3>
- Rizayani, S., Syaharuddin, S., Handy, M. R. N., Abbas, E. W., & Jumriani, J. (2022). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Kota Banjarbaru. *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2(1), 74–82. <https://doi.org/10.20527/pakis.v2i1.5209>
- Selvia, S., & Yeniwati, Y. (2020). Analisis Kausalitas Kemiskinan, Pekerja Anak dan Angka Putus Sekolah di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(3), 15. <https://doi.org/10.24036/jkep.v2i3.12673>
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama. <https://id.scribd.com/document/506402997/Membangun-Masyarakat-Memberdayakan-Rakyat>

- Susanto, D., Abubakar, A., & Galib, M. (2025). Takwa : Landasan Spiritual dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi dan Mewujudkan Keadilan Sosial. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 214–221.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Takwa%3A+Landasan+Spiritual+dalam+Menghadapi+Ketimpangan+Ekonomi+dan+Mewujudkan+Keadilan+Sosial+Dedi&btnG=
- Ulfah, A., & Huda, N. (2024). Analisis Kuantitatif Dalam Riset Kebijakan: Pendekatan, Karakteristik, Dan Pembahasan Hasil. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(6), 154–160. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jsm/article/view/3045>